

**ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA DI KOTA PADANG (STUDI PADA BPBD
PROVINSI SUMATERA BARAT)**

Iqra' Syahadatul Aisyah¹, Syarifah Hidayatuzzahra²,
Zahra Meisya Saharyani³, Boni Saputra⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Padang

1igraaisyah06@gmail.com, 2syarifahhdyh25@gmail.com,
3zahrameisya385@gmail.com, 4bonisaputra@fis.unp.ac.id

ABSTRACT

This study is motivated by the high level of disaster vulnerability in Padang City, which requires an effective, integrated, and multi-stakeholder disaster management system. The collaborative governance approach is essential in addressing the complexity of disaster issues that cannot be handled sectorally. This research aims to analyze the implementation of collaborative governance in disaster management in Padang City through the role of the Regional Disaster Management Agency of West Sumatra Province. This study employs a qualitative descriptive method with data collected through interviews and documentation. The results indicate that collaboration involves multiple cross-sector actors through a pentahelix approach, with the disaster management agency acting as coordinator, implementer, and commander in all disaster phases. The collaboration mechanism is carried out through an emergency command system, cluster-based role division, and formal inter-agency cooperation. However, the implementation is not yet optimal due to coordination challenges, differences in operational procedures among institutions, and low community participation. Therefore, strengthening cross-sector coordination, improving community capacity, and developing sustainable collaborative forums are necessary to enhance the effectiveness of disaster management in the future.

Keywords: collaborative governance, disaster management, BPBD, pentahelix, coordination

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya tingkat kerawanan bencana di Kota Padang yang menuntut adanya sistem penanggulangan bencana yang efektif, terintegrasi, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan collaborative governance menjadi penting dalam mengatasi kompleksitas permasalahan bencana yang tidak dapat ditangani secara sektoral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam penanggulangan bencana di Kota Padang melalui peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat. Metode yang digunakan adalah

deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi telah melibatkan berbagai aktor lintas sektor melalui pendekatan pentahelix, dengan BPBD berperan sebagai koordinator, pelaksana, dan komando dalam setiap tahapan bencana. Mekanisme kolaborasi dilakukan melalui sistem komando tanggap darurat, pembagian peran berbasis klaster, serta kerja sama formal antar lembaga. Namun, implementasi kolaborasi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala koordinasi, perbedaan standar operasional prosedur antar lembaga, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pengembangan forum kolaboratif yang berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di masa depan.

Kata Kunci: collaborative governance, penanggulangan bencana, BPBD, pentahelix, koordinasi

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Kondisi geografis Indonesia yang berada pada pertemuan lempeng tektonik aktif menyebabkan wilayah Indonesia rentan terhadap berbagai jenis bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Bencana tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berdampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan keselamatan masyarakat sehingga penanggulangan bencana menjadi salah satu isu penting dalam administrasi publik (Ruchban et al., 2024).

Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam wilayah dengan

tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tingginya frekuensi kejadian bencana dalam beberapa tahun terakhir. Data kejadian bencana tersebut disajikan pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Kejadian Bencana
Provinsi Sumatera Barat Tahun
2024**

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Persentase%
1	Cuaca Ekstrem	582	34,89%
2	Tanah Longsor	268	29,55%
3	Banjir	233	21,81%
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	35	5,8%
5	Gelombang Pasang dan Abrasi	14	5,8%
6	Erupsi Gunung Api	4	1,77%
7	Kekeringan	2	0,67%
Total		1.175	100%

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2024, tercatat sebanyak 1.175 kejadian bencana yang terdiri dari cuaca ekstrem, tanah longsor, banjir,

kebakaran hutan dan lahan, gelombang pasang, erupsi gunung api, dan kekeringan. Jenis bencana yang paling dominan adalah cuaca ekstrem sebanyak 582 kejadian atau 34,89%, diikuti tanah longsor sebanyak 268 kejadian atau 29,55%, serta banjir sebanyak 233 kejadian atau 21,81% (BPBD Sumatera Barat, 2024). Tingginya angka kejadian bencana tersebut menunjukkan bahwa Sumatera Barat memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap bencana hidrometeorologi maupun geologi.

Sementara itu, jenis bencana lain seperti kebakaran hutan dan lahan, gelombang pasang dan abrasi, erupsi gunung api, serta kekeringan memiliki jumlah kejadian yang relatif lebih rendah, dengan persentase masing-masing di bawah 6%. Meskipun demikian, bencana-bencana tersebut tetap memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat juga menjadi salah satu daerah yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi, terutama terhadap ancaman gempa

bumi dan tsunami. Selain faktor geografis, tingginya kepadatan penduduk dan aktivitas pembangunan perkotaan turut meningkatkan risiko dan dampak yang ditimbulkan ketika bencana terjadi. Oleh karena itu, diperlukan sistem penanggulangan bencana yang efektif, terintegrasi, dan melibatkan berbagai pihak agar risiko bencana dapat diminimalkan.

Penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan secara sektoral oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai aktor seperti masyarakat, sektor swasta, akademisi, media, dan organisasi masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan collaborative governance menjadi penting karena menekankan pada kerja sama antar aktor dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Collaborative governance dipahami sebagai bentuk tata kelola pemerintahan yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama melalui kerja sama yang terkoordinasi (Noor et al., 2022). Pendekatan ini dinilai relevan dalam penanggulangan bencana karena bencana merupakan persoalan multidimensional yang membutuhkan sinergi lintas sektor.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran strategis sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam koordinasi, pelaksanaan, dan komando penanganan bencana di daerah. BPBD tidak hanya bertugas saat terjadi bencana, tetapi juga berperan dalam kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana (Heryati, 2020). Keberhasilan penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh kemampuan BPBD dalam membangun koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak yang terlibat.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa collaborative governance memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana. Penelitian Firdaus (2024) menunjukkan bahwa koordinasi komunikasi antar lembaga menjadi faktor penting dalam penanganan bencana Galodo di Sumatera Barat. Selain itu, penelitian Abdurrahman (2025) menjelaskan bahwa collaborative governance mampu meningkatkan efektivitas penanganan bencana melalui keterlibatan berbagai aktor dalam

proses koordinasi dan pengambilan keputusan. Namun, penelitian mengenai penerapan collaborative governance dalam penanggulangan bencana di Kota Padang, khususnya melalui peran BPBD Provinsi Sumatera Barat, masih belum banyak dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan collaborative governance dalam penanggulangan bencana di Kota Padang melalui peran BPBD Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam penanggulangan bencana serta mengidentifikasi peran BPBD dalam mengoordinasikan berbagai aktor yang terlibat. Naskah menggunakan bahasa Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2019:9). Pendekatan ini digunakan untuk memahami

bagaimana proses collaborative governance dalam penanggulangan bencana di Kota Padang, khususnya dalam membangun kerja sama dan koordinasi antara berbagai aktor yang terlibat melalui BPBD Provinsi Sumatera Barat. Penulisan dilakukan melalui pengumpulan data primer dan sekunder, di mana data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak BPBD, sedangkan data sekunder didapat dari literatur, dokumen resmi, situs web, dan sumber pustaka lain yang relevan dengan topik penelitian.

Informan dalam laporan ini adalah Ilham Wahab, S.Sos, selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat, yang ditunjuk langsung oleh pihak instansi untuk memberikan informasi terkait proses collaborative governance dalam penanggulangan bencana di Kota Padang, khususnya mengenai koordinasi dan kerja sama antarlembaga yang terlibat. Pemilihan informan tidak dilakukan oleh penulis, melainkan sepenuhnya ditentukan oleh pihak instansi agar informasi yang diperoleh bersumber dari pihak yang memiliki tanggung jawab serta

pemahaman langsung terhadap topik yang dibahas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada Ilham Wahab di BPBD Provinsi Sumatera Barat guna memperoleh informasi mendalam mengenai proses collaborative governance dalam penanggulangan bencana di Kota Padang, khususnya terkait koordinasi dan kerja sama antara berbagai lembaga yang terlibat. Sementara itu, dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan data dari berbagai dokumen seperti laporan resmi Badan Penanggulangan Bencana Nasional, dokumen BPBD Provinsi Sumatera Barat, serta sumber daring yang berkaitan dengan collaborative governance dan penanggulangan bencana. Analisis data menggunakan model (Miles et al., 2014) yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk menginterpretasikan temuan penelitian serta memahami penerapan *collaborative governance* dalam penanggulangan bencana. Data yang telah dikumpulkan diseleksi dan dikategorikan berdasarkan tema-

tema tertentu, kemudian disajikan dalam bentuk matriks, tabel, atau narasi untuk mengidentifikasi pola-pola dan hubungan antar data (Helmi & Muthohharoh, 2024). Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan informan, serta melakukan member checking dengan mengkonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan (Lindell & Perry, 2004).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Pendekatan Collaborative Governance dalam Penanggulangan Bencana di Kota Padang

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, salah satu temuan utama adalah bahwa pendekatan kolaboratif telah menjadi fondasi utama dalam pengelolaan bencana di Kota Padang. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, sistem kolaborasi telah diadopsi secara struktural dan operasional di berbagai tahapan penanggulangan bencana, dari pra-bencana, tanggap darurat, hingga pasca-bencana.

BPBD sebagai lembaga utama memiliki peran sentral sebagai pengendali dan penggerak seluruh proses kolaborasi ini. Sebagai instansi yang bertanggung jawab langsung terhadap penanggulangan bencana di daerah, BPBD menjalankan fungsi koordinasi, pelaksanaan, dan komando secara bersamaan. Dalam praktiknya, fungsi ini tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling terkait dan saling mendukung satu sama lain. Misalnya, selama tahap pra-bencana, BPBD lebih banyak berperan dalam melakukan edukasi, sosialisasi, dan pembangunan kapasitas masyarakat serta instansi terkait. Pada saat bencana terjadi, peran BPBD sebagai pusat komando menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh langkah tanggap darurat berjalan sesuai rencana dan terkoordinasi secara baik.

Selain peran sebagai koordinator, BPBD juga mengadopsi pendekatan pentahelix, yang melibatkan lima unsur utama: pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan media. Pendekatan ini menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak dapat hanya bergantung pada satu pihak,

melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor secara aktif dan berkesinambungan. Keberhasilan kolaborasi ini sangat bergantung pada pemahaman dan kesadaran seluruh aktor terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing, serta mekanisme kerja sama yang jelas dan terstruktur. Secara singkat dan jelas uraikan hasil yang diperoleh dan dilengkapi dengan pembahasan yang mengupas tentang hasil yang telah didapatkan dengan teori pendukung yang digunakan.

Mekanisme Koordinasi dan Sistem Komando Tanggap Darurat

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa mekanisme koordinasi di Kota Padang diatur secara terstruktur melalui sistem komando tanggap darurat yang terdiri dari berbagai bidang dan kluster. Setelah status bencana ditetapkan secara resmi melalui rapat multi-pihak, BPBD akan membentuk struktur organisasi yang lengkap dengan bidang-bidang sesuai kebutuhan, seperti operasi, logistik, pencarian dan penyelamatan, kesehatan, dan lain-lain.

Sistem ini memungkinkan pengambilan keputusan yang terpusat dan terkoordinasi, mengurangi

tumpang tindih kewenangan dan potensi konflik. Sebagai contoh, dalam penanganan pencarian dan penyelamatan, Basarnas biasanya akan menjadi komandan utama, sementara bidang-bidang lain seperti kesehatan, logistik, dan sosial berperan sebagai pendukung yang menjalankan tugas operasional sesuai bidangnya.

Selain itu, di setiap fase bencana, mekanisme ini diikuti dengan rapat-rapat rutin, baik pagi maupun malam hari, yang bertujuan untuk mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil dan merencanakan tindakan selanjutnya. Keberadaan rapat ini memfasilitasi komunikasi real-time antar aktor, menjaga keselarasan langkah, dan mengantisipasi berbagai tantangan di lapangan.

Pada fase pasca-bencana, sistem ini tetap berlangsung, tetapi lebih berfokus pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Melalui dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P), seluruh pihak terkait menyusun kebutuhan, kerusakan, dan kerugian secara rinci, yang kemudian menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pemulihan.

Kendala Koordinasi dan Perbedaan SOP Antar Instansi

Meskipun sistem koordinasi telah berjalan cukup baik, berbagai kendala muncul dalam praktiknya. Salah satu hambatan utama adalah perbedaan sistem dan standar operasional prosedur (SOP) antar lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah. Perbedaan ini seringkali menyebabkan kesulitan dalam menyelaraskan data, mengkoordinasikan tindakan, dan memastikan konsistensi informasi yang disampaikan ke masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Contohnya, dalam penghitungan korban dan distribusi bantuan, BPBD harus bekerja sama dengan instansi lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan TNI/Polri. Setiap institusi memiliki prosedur dan sistem pencatatan sendiri, sehingga terkadang data yang dihasilkan tidak sinkron. Hal ini berpotensi menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan serta kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan.

Untuk mengatasi masalah ini, BPBD menerapkan sistem komando terpusat, yang disebut Sistem

Komando Tanggap Darurat, sebagai mekanisme utama dalam pengambilan keputusan. Dengan sistem ini, seluruh informasi dan data harus mengacu pada mekanisme yang telah disepakati bersama, sehingga meski sistem dan SOP berbeda-beda, keputusan strategis tetap diambil secara terpadu dan terstandar.

Peran MOU dan Kerja Sama Formal Antarlembaga

Penguatan kolaborasi juga dilakukan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BPBD provinsi dengan berbagai instansi terkait, baik di tingkat daerah maupun lintas daerah. MoU ini menjadi landasan formal yang menjamin adanya kerja sama yang terstruktur dan memiliki komitmen bersama dalam penanggulangan bencana.

Dalam praktiknya, BPBD membangun MoU dengan BPBD kabupaten/kota, dinas-dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta perguruan tinggi dan lembaga pendidikan. Selain itu, juga ada MoU dengan institusi di luar pemerintahan, seperti BUMN, pihak swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Kerja

sama ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pertukaran data, pelaksanaan latihan bersama, pengembangan teknologi, hingga pengadaan sumber daya.

Namun, tantangan muncul terkait implementasi MoU, terutama dalam hal konsistensi dan komitmen jangka panjang. Beberapa MoU yang telah disepakati belum diikuti dengan pelaksanaan nyata secara rutin, sehingga kolaborasi tetap bersifat retorik. Oleh karena itu, perlu adanya forum komunikasi dan evaluasi berkala agar MoU dapat diaktualisasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Kendala dan Tantangan dalam Kolaborasi antar Aktor

Selain perbedaan SOP, kendala lain yang dihadapi adalah adanya hambatan komunikasi, persepsi yang berbeda, serta kekhawatiran akan konflik kepentingan. Dalam situasi bencana, kecepatan dan ketepatan informasi sangat penting, namun di lapangan seringkali terjadi kekurangan komunikasi yang efektif antar aktor. Beberapa aktor cenderung bekerja secara mandiri tanpa koordinasi yang cukup, sehingga potensi tumpang

tindih tugas dan kebingungan pun muncul.

Selain itu, faktor kekhawatiran akan konflik kepentingan, misalnya antara instansi pusat dan daerah, atau antara pemerintah dan swasta, dapat melemahkan kepercayaan dan menghambat kerja sama. Di samping itu, perbedaan budaya organisasi dan tingkat kapabilitas sumber daya manusia juga memengaruhi sinergi antar aktor.

BPBD berupaya mengatasi hambatan ini melalui sistem rapat rutin, forum koordinasi, dan pelatihan bersama. Tetapi, keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada kemampuan setiap aktor untuk membangun kepercayaan dan saling memahami tujuan bersama. Penguatan aspek kepercayaan dan komunikasi menjadi kunci utama agar kolaborasi dapat berjalan lebih efektif.

Partisipasi Masyarakat dan Inklusi dalam Penanggulangan Bencana

Hasil wawancara menyoroti bahwa partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam rangka memperkuat kolaborasi. Meskipun berbagai program sosialisasi dilakukan, tingkat pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana,

seperti tsunami dan banjir, masih rendah. Banyak masyarakat belum memiliki rencana evakuasi yang jelas, dan sebagian besar hanya mengetahui jalur evakuasi secara umum tanpa latihan langsung.

Untuk meningkatkan partisipasi, BPBD dan instansi terkait mengembangkan berbagai kegiatan, termasuk pelatihan, simulasi, dan pembentukan komunitas tangguh bencana. Salah satu strategi yang diterapkan adalah membangun kesadaran melalui pendidikan kebencanaan di tingkat sekolah dan komunitas. Program ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman tentang risiko, langkah-langkah mitigasi, serta prosedur evakuasi.

Selain itu, pentingnya inklusi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan penanggulangan bencana juga semakin disadari. Melalui forum-forum diskusi dan kelompok masyarakat, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga aktif sebagai bagian dari proses kolaboratif. Pendekatan ini akan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama, sehingga kesiapsiagaan dan kecepatan respons meningkat.

Peran Teknologi dan Media dalam Mendukung Koordinasi dan Informasi Kebencanaan

Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung efektivitas kolaborasi dan komunikasi selama penanggulangan bencana. BPBD telah mengembangkan sistem monitoring dan peringatan dini berbasis teknologi, seperti Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) dan integrasi data melalui platform digital. Teknologi ini memungkinkan pengumpulan data real-time, analisis cepat, dan pengiriman informasi yang akurat kepada seluruh aktor dan masyarakat.

Selain teknologi, media massa dan media sosial juga berperan besar dalam menyebarkan informasi, edukasi, dan membangun kepercayaan masyarakat. BPBD aktif menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi resmi, update kondisi bencana, serta langkah-langkah mitigasi. Pendekatan ini efektif karena media sosial mampu menjangkau berbagai kalangan, termasuk generasi muda dan komunitas yang sulit dijangkau melalui media tradisional.

Namun, tantangan muncul terkait penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, hoaks, dan kepanikan massa. Oleh karena itu, BPBD dan media harus bekerja sama untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kredibel, tepat waktu, dan bersifat edukatif.

Peningkatan Kapasitas dan Kesiapsiagaan Masyarakat

Selaras dengan upaya kolaboratif dan penggunaan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat menjadi aspek strategis yang harus terus didorong. Banyak pelatihan, simulasi, dan workshop yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko bencana, termasuk jalur evakuasi dan tindakan yang harus dilakukan saat bencana terjadi.

Selain pelatihan, pengembangan perangkat kebencanaan berbasis komunitas seperti Satuan Pendidikan Aman Bencana, Kampung Tangguh, dan Posko Siaga menjadi bagian dari strategi penguatan kapasitas. Melalui kegiatan ini, masyarakat dilatih secara langsung agar mampu merespons secara cepat dan tepat, bahkan dalam kondisi yang penuh tekanan dan panik.

Selain itu, edukasi berbasis pendidikan formal, seperti integrasi materi kebencanaan dalam kurikulum sekolah, diharapkan mampu membentuk generasi yang sadar dan tangguh terhadap risiko bencana. Kesadaran ini penting agar masyarakat mampu melakukan langkah-langkah preventif secara mandiri dan kolektif.

Peran Forum dan Rencana Pengurangan Risiko Bencana (PRRB)

Salah satu keberhasilan yang diidentifikasi adalah terbentuknya forum pengurangan risiko bencana yang melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah, dan masyarakat. Forum ini berfungsi sebagai wadah diskusi, pertukaran informasi, dan pengembangan kebijakan berbasis bukti.

Selain itu, keberadaan Rencana Pengurangan Risiko Bencana (PRRB) menjadi dokumen penting sebagai pedoman strategis. Dalam pelaksanaan, PRRB digunakan untuk menentukan prioritas, penetapan program, serta pengalokasian sumber daya secara efektif dan efisien. Melalui proses evaluasi dan monitoring secara

berkala, forum dan PRRB menjadi alat yang mendukung penguatan kolaborasi dan pengelolaan risiko secara sistematis.

Keberhasilan forum ini sangat bergantung pada tingkat partisipasi aktif anggota, komitmen, dan keberlanjutan pertemuan. Peningkatan kapasitas fasilitator dan penguatan jaringan komunikasi di dalam forum menjadi kunci keberlanjutan program.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan *collaborative governance* dalam penanggulangan bencana di Kota Padang melalui BPBD Provinsi Sumatera Barat telah berjalan dengan melibatkan berbagai aktor lintas sektor melalui pendekatan pentahelix. BPBD berperan sebagai aktor utama yang menjalankan fungsi koordinasi, pelaksanaan, dan komando dalam setiap tahapan bencana. Kolaborasi telah terbangun secara struktural melalui mekanisme seperti Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana, pembagian peran berbasis klaster, serta dukungan kerja sama formal melalui *Memorandum of Understanding* (MoU).

Namun demikian, implementasi *collaborative governance* tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih dominannya peran pemerintah dalam pengambilan keputusan, keterbatasan partisipasi aktor non-pemerintah, serta adanya kendala dalam koordinasi akibat perbedaan sistem dan standar operasional prosedur (SOP) antar lembaga. Selain itu, efektivitas kolaborasi juga dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mitigasi bencana, sehingga upaya pengurangan risiko bencana belum berjalan secara maksimal.

Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam penguatan *collaborative governance* ke depan, antara lain melalui peningkatan koordinasi lintas sektor yang lebih terintegrasi, penguatan forum kolaboratif yang berkelanjutan, serta harmonisasi mekanisme dan SOP antar lembaga. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi kebencanaan juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas kolaborasi. Dengan demikian, penanggulangan bencana di Kota Padang diharapkan dapat berjalan

lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. A. (2025). Analisis collaborative governance dalam penanganan bencana alam tanah longsor di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta. *Imperium: Jurnal Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana*, 1(2).
- Ansell, C., Doberstein, C., Henderson, H., Siddiki, S., & 't Harte, P. (2020). Understanding inclusion in collaborative governance: A mixed methods approach. *Policy and Society*, 39(4), 570–591.
- Arif, M. (2019). Analisis wilayah berpotensi banjir daerah Sumatera Barat untuk pelaksanaan pembelajaran geografi berorientasi bencana alam. *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*, 4(1), 53–60.
- Aziz, M. H. (2023). Komunikasi kebencanaan: Peran dan manfaat pada mitigasi. *Communications*, 5(1), 301–316.
- Febrian, R. A. (2024). Mitigasi bencana dalam perspektif kebijakan publik di Kota Malang. *JADMENT: Journal of Administration & Development*, 1(2).
- Firdaus, D. (2024). *Manajemen komunikasi bencana Galodo Sumatera Barat 2024 (Studi kasus BPBD Provinsi Sumatera Barat)*. Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Fitrianto, M. R. (2020). Evaluasi kebijakan penanggulangan bencana (studi pada BPBD Kabupaten Kediri). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 6(2).
- Garvera, R. R., Arifin, F. S., & Fazrilah, A. N. (2021). Collaborative governance dalam mewujudkan desa mandiri. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(3).
- Heryati, S. (2020). Peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JPKP)*, 2(2).
- Indarti, S., Insyiroh, R., & Darmi, T. (2023). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu dalam penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu. *JMPKP: Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik*, 5(2).
- McNaught, R. (2024). The application of collaborative governance in local level climate and disaster resilient development: A global review. *Environmental Science and Policy*.
- Nofrialdi, R., & Ikhsan. (2023). Rancang bangun monitoring dan peringatan dini banjir berbasis Internet of Things (IoT) di Pusdaplops PB BPBD

- Sumatera Barat. *Jurnal Pustaka Data*. entanglements. *Public Management Review*.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative governance: Suatu tinjauan teoritis dan praktik*. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara.
- Ruchban, A. L., Darwis, R. S., & Wibowo, H. (2024). Elemen kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana di Indonesia. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(1).
- Setiawan, A., Rusba, K., Ramdan, M., Saputra, D., & Swandito, A. (2024). Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Balikpapan. *Identifikasi: Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan*, 10(1).
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tasman, H. T. (2021). *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pencegahan bencana banjir di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat*. Skripsi. Universitas Andalas.
- Ulibarri, N., Siddiki, S., & Imperial, M. (2023). Drivers and dynamics of collaborative governance in environmental management. *Environmental Management*.
- Wang, H., & Ran, B. (2023). Network governance and collaborative governance: A thematic analysis on their similarities, differences, and